

Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA EKSPORTIR

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir	1.1.1 Eksportir memiliki izin yang sah	1.1.1.a Nomor Induk Berusaha (NIB)	1. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir 2. Periksa kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, identitas/KTP untuk perusahaan perorangan 3. Periksa informasi geo lokasi (titik GPS) auditi	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha 2. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi)
		2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah	1.1.1.b Legalitas perdagangan	Periksa legalitas perdagangan dan kesesuaian dengan KBLI pada NIB.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB 2. Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI pada NIB

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			1.1.1.c Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam hal memiliki gudang	1. Periksa dan Tanda Daftar Gudang (TDG) 2. Jika TDG bukan milik sendiri, periksa bukti penguasaan (perjanjian sewa tempat)	<u>Memenuhi:</u> a. Terdapat TDG (dalam hal memiliki/menguasai gudang) yang diterbitkan instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha dan sesuai dengan bukti kepemilikan/penguasaan
			1.1.1.d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa kesesuaian dokumen NPWP dengan NIB	<u>Memenuhi:</u> Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
			1.1.1.e Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama 2. Periksa keberadaan S-Legalitas dari PBPHH atau PB Usaha Industri	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. (Dilengkapi dengan data PBPHH atau PB Usaha Industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.	K.2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir		2.1.1.a Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota suplai produk dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Periksa dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri pemasok. Periksa kesesuaian Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri dengan klasifikasi PBPHH atau PB Usaha Industri yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri tidak bisa diterbitkan untuk produk kayu yang termasuk CITES 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. Seluruh mitra pemasok memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. (Dilengkapi data seluruh mitra pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri) Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri sesuai dengan klasifikasi PBPHH atau PB Usaha Industri yang menerbitkan Tidak ada deklarasi hasil hutan untuk produk kayu CITES
			2.1.1.b Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keabsahan dan kesesuaian 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh perdagangan dan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				<p>dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pengangkutan</p> <p>2. Periksa kesesuaian jenis produk, jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan pada periode yang sama.</p> <p>3. Periksa kelengkapan izin CITES untuk produk kayu CITES</p>	<p>pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan).</p> <p>(Dilengkapi data jenis produk, jumlah dokumen dan volume dalam periode audit)</p> <p>b. Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p>(Dilengkapi data stock pada laporan mutasi produk dalam periode audit)</p> <p>c. Produk kayu CITES dilengkapi dengan izin CITES yang sesuai</p>
			2.1.1.c Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Periksa kesesuaian Tanda SVLK dengan asal-usul kayu (status sertifikasi atau deklarasi hasil hutan secara mandiri) sesuai dengan ketentuan Tanda SVLK	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tanda SVLK sesuai dengan asal-usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	K.2.2. Ekspor produk industri kehutanan.	2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	2.2.1.a Dokumen ekspor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)	<u>Memenuhi:</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal s.d CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)
			2.2.1.b Dokumen pembedulan ekspor Jika terdapat pembedulan ekspor	Periksa keberadaan dokumen pembedulan ekspor yang digunakan (jika ada)	<u>Memenuhi:</u> Dokumen pembedulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
			2.2.1.c Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			2.2.1.d Izin CITES Jika bahan baku kayu termasuk CITES	1. Periksa ketersediaan izin edar 2. Periksa izin CITES dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan	<u>Memenuhi :</u> Tersedia izin edar yang sah dari instansi Seluruh kayu yang termasuk CITES dilengkapi izin CITES

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				3. Periksa kesesuaian izin CITES dengan dokumen angkutan kayu	
			2.2.1.e Lokasi <i>stuffing</i>	Periksa kesesuaian lokasi <i>stuffing</i> barang yang diekspor	Lokasi <i>stuffing</i> barang yang diekspor sesuai dengan lokasi Auditi, yang disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (<i>geotagging</i>).
			2.2.1.f Purchase Order (PO)	Periksa kepemilikan dan kesesuaian barang yang diekspor dengan PO dari buyer	<u>Memenuhi:</u> Produk yang diekspor adalah produk yang sesuai dengan order dari buyer
		2.2.2 Pemenuhan Tanda SVLK	2.2.2.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa lingkup perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda SVLK 2. Periksa keberadaan Tanda SVLK pada produk hasil olahan dan/atau kemasan produk dan/atau dokumen/lampirannya a untuk produk yang diekspor 3. Periksa kesesuaian tanda SVLK yang 	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk dan/atau kemasan dan/atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. b. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan tanda SVLK produk asal

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dibubuhkan dengan tanda SVLK produk asal	
		2.2.3. Penjualan dalam negeri	2.2.3.a Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kebenaran bukti gagal ekspor 2. periksa kesesuaian produk yang dijual dalam negeri dengan produk gagal ekspor 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat bukti pembatalan ekspor oleh pembeli (buyer) b. terdapat bukti pembatalan dokumen V-legal/FLEGT License pada SILK jika sudah dilakukan penerbitan V-Legal/FLEGT License c. produk yang dijual dalam negeri tidak boleh melebihi produk gagal ekspor (jenis, jumlah, dan volume)
P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3.	3.1.1.a Pedoman/ prosedur K3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/ prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3</p>
			3.1.1.b Implementasi prosedur K3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ketersediaan dokumen prosedur K3. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				2. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi prosedur K3.	jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
			3.1.1.c Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Periksa ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
			3.1.1.d Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
	3.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	3.2.1.a Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen.	<u>Memenuhi :</u> Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP	3.2.2.a Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	3.2.3.a Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja 3. Ketentuan batasan usia kurang dari 18 tahun dikecualikan bagi yang sudah berkeluarga/menikah	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. atau Ditemukan pekerja berusia kurang dari 18 tahun tetapi telah memenuhi ketentuan.
		3.2.4. Pengarus-utamaan gender	3.2.4.a Terdapat kebijakan persamaan gender	1. Periksa ketersediaan bukti kebijakan persamaan gender	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat diskriminasi gender

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan	Dilengkapi data terpilah gender pegawai

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik,



Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

ttd

AGUS JUSTIANTO